

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESA DI KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN
SUMEDANG**

Diajukan Untuk Memenuhi sebagian Syarat Ujian Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

Disusun oleh:
MUHAMAD RIZAL FADILAH
NPM. E.1735223023



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADIMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

2021

ILMU ADMINISTRASI NEGERA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PERSETUJUAN


Judul Skripsi:

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI
KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Skripsi

Pembimbing I,



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si

NIDN.04-3012-7012

Pembimbing II,



Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si

NIDN.04-1605-8703

Mengetahi/menyetujui
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Sebelas April Sumedang



Rika Kusdinar, S.sos., M.Si

NIDN. 04-3012-7012

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun Usulan Penelitian ini untuk salah satu syarat tugas akhir kuliah ini tepat pada waktunya. Tugas akhir penelitian ini membahas Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak H. Yuyun Hidayat, Drs selaku ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang.
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Si selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

6. Yth. Ibu Lelas Sulastri, S.Sos., M.Si selaku ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
7. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S. sos.,M. Si sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak/Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
9. Yth. Bapak Asep Aan Dahlan selaku Camat di Kecamatan Ciamalaka Kabupaten Sumedang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
10. Yth. Bapak/Ibu pegawai beserta seluruh staf di Kecamatan Cimalaka yang telah memberikan ijin melakukan penelitian dan membantu dalam pengumpulan data.
11. Ibu selaku orang tua serta Kakak saya yang telah setia memberikan dukungan secara materil maupun spiritual.
12. Semua rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

Semoga segala amal kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada peneliti diterima sebagai amal sholeh dan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Sumedang, April 2021

Muhamad Rizal Fadilah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang Penelitian	8
1.2 Fokus Permasalahan	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Kegunaan Penelitian	16
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Hakekat Administrasi Negara.....	17
2.1.1 Pengertian Administrasi Negara.....	17
2.1.2 Ruang Lingkup Administrasi Negara.....	20
2.1.3 Ciri-ciri Administrasi Negara.....	21
2.2 Pembangunan.....	22
2.2.1 Pengertian Pembangunan.....	22
2.2.2 Teori pembangunan.....	24
2.3 <i>Good Governance</i>	27
2.4 Partisipasi Masyarakat.....	35
2.6 Kajian penelitian terhadulu	51
2.7 Kerangka penelitian dan kisi-kisi pertanyaan penelitian	56
BAB III METODE PENELITIAN	62
3.1 Desain penelitian.....	62
3.2 Penentu sasaran, informan, dan Narasumber penelitian.....	65
3.3 Teknik pengumpulan data.....	68
3.4 Prosedur pengolahan data.....	69
3.5 Lokasi dan jadwal penelitian.....	71
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
4.1 Gambaran umum objek penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.1. Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan Error! Bookmark not defined.	
2.1. Visi dan misi kecamatan	Error! Bookmark not defined.
2.2. Aspek pemerintahan	Error! Bookmark not defined.
4.2 Hasil penelitian dan pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB V	73
KESIMPULSN DSN SARAN	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 2.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	48
Tabel 3.2 Informan Penelitian	56
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penelitian	47
Gambar 3.1	Gambar Desain Penelitian	53
Gambar 3.2	Alur Pengelolaan Data.....	58



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dan sumber keuangan baru yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan nasional. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan yang selama ini cenderung seragam mulai berubah dan cenderung bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah yang selama ini hanya merupakan pendukung dari kebijakan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah. Perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yaitu:

1. Pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan).
2. Pemerintah daerah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal).

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya

sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa. Dilain pihak bahwa pembangunan desa atau kelurahan diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua. Dalam pasal 78 UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran tertentu yang mendorongnya untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sunbangan dana, tenaga, fikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan kadar partisipasi seringkali di tentukan secara masa yakni dari banyaknya individu yang di libatkan. Padahal partisipasi pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat dalam memperoleh informasi.

Dalam melaksanakan tujuan pembangunan, maka segala potensi yang ada harus dikembangkan, seperti potensi manusia berupa penduduk yang harus pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan tercapainya pelaksanaan program pembangunan.

Pembangunan desa harus dilakukan agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam pembangunan pedesaan harus ada kerangka yang jelas apa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu serta adanya kesamaan gerak dan langkah pemerintah diberbagai tingkatan, dalam artian lain adanya kesamaan gerak dan langkah pemerintah diberbagai tingkatan, dalam artian lain adanya kesamaan gerak dan langkah pembangunan perkotaan dan pedesaan. Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan desa, hal yang paling di butuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik.

Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembanga khususnya dalam pembuatan keputusan, sejauh ini partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahapan perencanaan, pengambilan keputusan bahkan pendanaan.

Pemerintah perlu membina masyarakat dalam melaksanakan apa yang di butuhkan, melaksanakan program yang telah di rencanakan dan menjaga atau melestarikan program yang telah di laksanakan. Pelaku utama dalam pembangunan adalah masyarakat itu sendiri sehingga pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator. Semua kegiatan mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi, masyarakatlah yang berperan dan mempunyai hak dalam memberikan ide dan pengambilan keputusan. Maka pelaksanaan pembangunan di desa kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan di tingkatkan sehingga partisipasi dapat di rasakan.

Berdasarkan hasil observasi awal, di temukan adanya faktor-faktor yang menunjukan masih rendahnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, hal ini dapat di lihat dari beberapa indikasi-indikasi sebagai berikut;

1. masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi. Dapat di lihat dari kurangnya keikutsertaan langsung masyarakat dalam pembangunan desa.

2. masih rendahnya pengetahuan masyarakat sekitar dalam berpartisipasi untuk pembangunan desa di kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Dapat di lihat dari banyaknya masyarakat yang belum paham apa itu berpartisipasi dalam pembangunan desa.

3. kurangnya berkomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Ini dapat di buktikan dengan melihat masyarakat ketika apa yang harus di kerjakan terlebih dahulu dalam pembangunan desa di Kecamatan Cimalaka.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa menuju kearah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan desa di Kecamatan Cimalaka juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat desa di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan desa. Peran pemerintah desa di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sudah dikatakan baik terutama dalam masalah pembangunan desa, dimana pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya agar pembangunan di desa dapat berkembang dan menuju kearah yang lebih baik melalui berbagai macam cara, seperti melalui musyawarah perencanaan pembanguna desa sehingga menghasilkan berbagai program-program

pembangunan, melalui komunikasi politik dengan pemerintah daerah untuk suatu kegiatan pembangunan.

Seperti yang dijelaskan oleh Camat Cimalaka Asep Aan Dahlan (<https://sumedangkab.go.id/>) meminta pemerintah desa tidak berhenti mengembangkan potensi masyarakatnya. Camat berharap semua desa yang berada di Kecamatan Cimalaka mampu menjadi desa mandiri.

Saat ini tim Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) sedang melakukan verifikasi ke desa-desa yang dipilih. Kegiatan BBGRM menilai bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dibagi empat bidang yaitu sosial, budaya, ekonomi, agama, serta lingkungan hidup. Bagaimana mengintegrasikannya, harus menjadi pemikiran bersama bagaimana pemerintah dengan masyarakatnya mampu bekerja sama mengembangkan desanya menjadi desa mandiri,

Menurutnya, para kepala desa harus jeli dalam melihat potensi yang dimiliki desanya, 14 desa di Kecamatan Cimalaka sudah memiliki BUMDes. Diharapkan dengan adanya BUMDes mampu mengangkat setiap potensi yang ada. Pemerintah desa tidak hanya mengandalkan, bisa dari swadaya masyarakat, yang tidak berdaya menjadi berdaya, dengan berdirinya BUMDes harus menjadi modal utama dalam mengangkat potensi serta membantu masyarakatnya,

Tetapi tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan Cimalaka, maka akan mengalami hambatan, bahkan tidak akan dapat terwujud atau dikatakan tidak berhasil, Karena terdapat beberapa kondisi dan keadaan masyarakat Kecamatan Cimalaka

Kabupaten Sumedang yang menolak untuk berpartisipasi bahkan mengatakan tidak mau terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam kegiatan pembangunan desa. Seharusnya sebagai masyarakat yang tinggal atau berdomisili di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang harus berpartisipasi dalam pembangunan desa, mengingat bahwa kegiatan pembangunan di desa bukan untuk kepentingan beberapa orang atau sekelompok orang saja melainkan untuk kepentingan dan kebutuhan banyak orang

Dari uraian tersebut diatas jelaslah sudah, bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga tergantung dari peran serta atau partisipasi masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Mengenai hal tersebut memunculkan permasalahan yang menarik untuk di kaji yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat desa. Oleh karena itu peneliti mengenai hal tersebut penting untuk di lakukan , dengan mengamati partisipasi masyarakat yang selama ini di laksanakan, apakah masyarakat desa sudah berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di desa, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG.”

1.2 Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas, maka mengidentifikasi masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang?
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang?
3. Apa saja upaya-upaya dalam mengatasi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan dan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian di rumuskan:

1. Untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang.

1.4 Kegunaan Penelitian

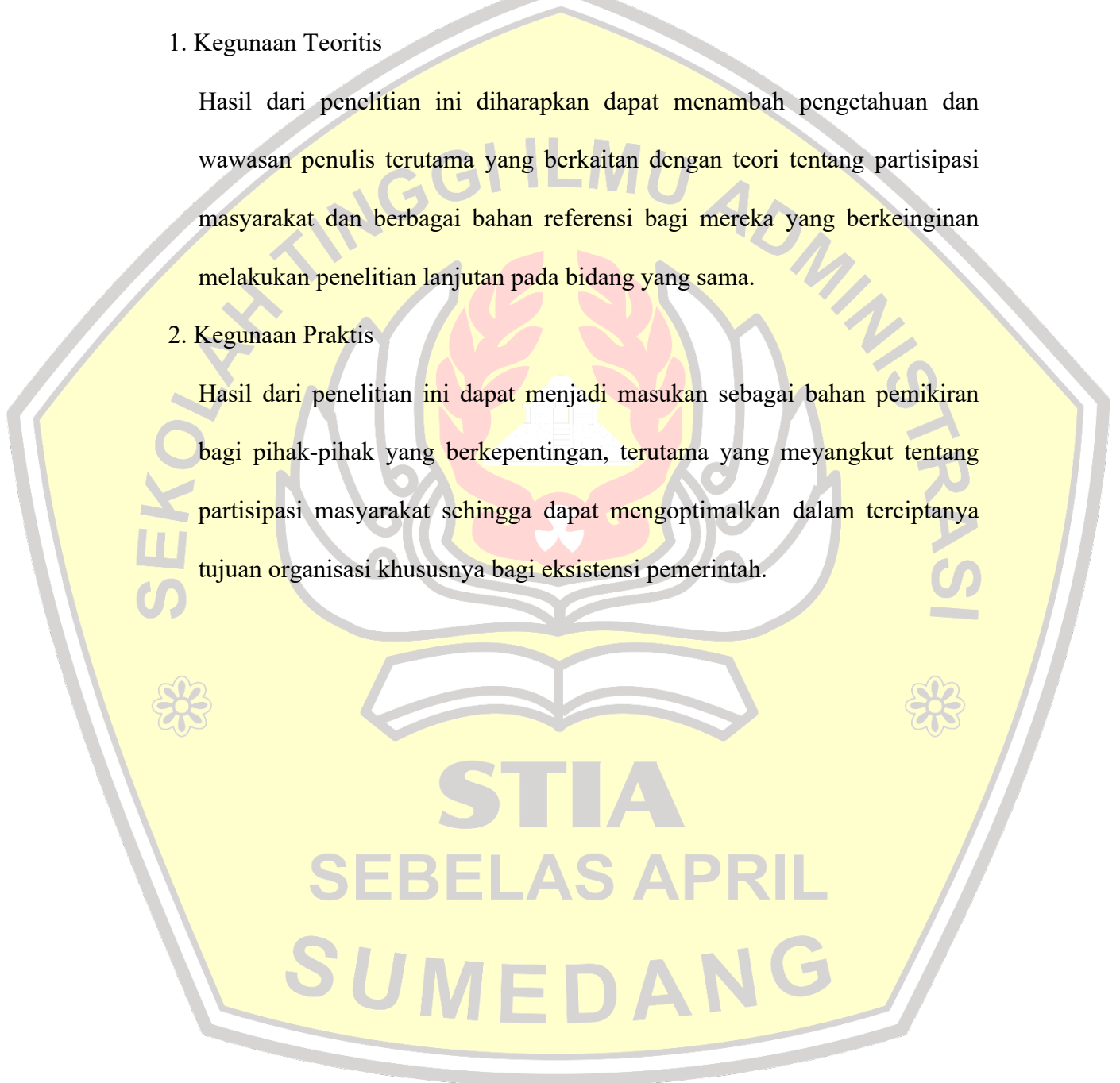
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama yang berkaitan dengan teori tentang partisipasi masyarakat dan berbagai bahan referensi bagi mereka yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama yang meyangkut tentang partisipasi masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan dalam terciptanya tujuan organisasi khususnya bagi eksistensi pemerintah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hakekat Administrasi Negara

2.1.1 Pengertian Administrasi Negara

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Administration* yang bentuk infinitipnya *To Administer*. Dalam *Oxford advanced Learner 's Dictionary Of Current English* (1974) yang dikutip oleh Silalahi (1997: 2-3) kata administrasi diartikan sebagai *To Manage* (mengelola) atau *To Direct* (menggerakkan).

Selanjutnya Silalahi (1997: 5) mengemukakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai berikut:

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa data dan informasi yang disediakan, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern di peroleh melalui kegiatan administrasi dalam arti sempit tepatnya di sebut tata usaha (*Clerical Work, Office Work*). Sedangkan menurut Atmosudirjo (dalam Asyah, 2017) mengemukakan pengertian Administrasi, yaitu sebagai berikut:

Melihat Administrasi Negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (*strategy, policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (*implementasi* dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasalnya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan.

Selanjutnya Administrasi dalam arti luas banyak sarjana atau para ahli yang memberikan definisi atau pengertian yang berbeda beda sesuai dengan sudut pandangnya. The Liang Gie (2012 :29) memberikan definisi administrasi sebagai berikut: Administrasi kerjasama adalah segenap rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya Caiden (dalam Juhari, 2015) mengatakan bahwa Administrasi Negara meliputi setiap bidang dan aktivitas yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemerintah, termasuk proses formal kegiatan-kegiatan DPR, fungsi-fungsi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan, dan kegiatan dari lembaga-lembaga militer

. Senada dengan pendapat tersebut Atmosudirdjio (2014: 40) mengemukakan sebagai berikut:

Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau langsung secara kerjasama, antara sekelompok orang secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah di tentukan dan di rencanakan sebelumnya. Kerjasama antara orang-orang tersebut berlangsung dan melalui organisasi.

Sedangkan menurut Dimock dan Dimock (dalam Mustofa, 2001) Administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan, wewenang dan politiknya, dalam arti sempit aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman.

Dengan demikian, sebagai suatu proses admistrasi negara meliputi seluruh kegiatan mulai saat menentukan tujuan yang akan di capai kepada pelenggaraan

mencapai tujuan tersebut. Administrasi sebagai suatu organisasi merupakan wadah sekelompok orang untuk bekerjasama secara formal dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Saat ini sistem administrasi di tuntutan untuk lebih efisien dan efektif bahkan kita telah menyaksikan adanya pergeseran peran pemerintah dalam berbagai kehidupan ekonomi-sosial dengan lebih memberikan peran yang lebih besar kepada sektor swasta dan lembaga masyarakat lainnya untuk menjalankan sebagian fungsi pelayanan kepada masyarakat. Administrasi negara di tuntutan dapat mengantarkan terciptanya sistem pemerintahan Good Governance, dengan memanfaatkan peluang, tantangan dan ancaman.

Pengertian Administrasi negara dikemukakan oleh Waldo (dalam Iskandar, 2005: 8) adalah: Administrasi negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan. Selain itu, administrasi Negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang di pergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. Menurut Piffner and Presthus (dalam Handayani, 2013: 26),

mengemukakan bahwa: Public administrasi is a process concerned with carrying out policies. (Administrasi negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan Negara)

Sedangkan menurut Dimock (dalam Handayani, 2013: 26), mendefinisikan sebagai berikut: "Public administrasi is the activity of the state in the exercise of its political power. (Administrasi Negara adalah kegiatan negara dalam

melaksanakan kekuasaan/kewenangan politiknya). Nigro memberikan suatu deskripsi yang merupakan suatu uraian singkat tentang Administrasi Negara, dan menyatakan bahwa Administrasi Negara sebagai berikut:

1. Suatu kebijakan kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. Meliputi ketiga cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan mereka
3. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik (publik policy) dan merupakan bagian dari proses politik.
4. Dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat.
5. Sangat berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, sebagai suatu sesuatu proses administrasi negara meliputi kegiatan mulai saat penentuan tujuan yang akan dicapai dan sampai penyelenggaraan tujuan tersebut, administrasi sebagai organisasi adalah sebagai alat atau wadah sekelompok orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.2 Ruang Lingkup Administrasi Negara

Dari rumusan administrasi negara di atas, dapat di temukannya dan di rumuskan ruang lingkup yang merupakan bidang perhatian administrasi negara. Lembaga Administrasi Negara RI (2003 : 10) mengemukakan bahwa di tinjau dari segi unturnya yang pokok dalam kehadirannya sebagai disiplin dan sebagai sistem lingkup perhatian administrasi tersebut meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

1. Tata nilai yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan administrasi negara, yang menyentuh nilai-nilai cultural, dan institusional yang berkembang dalam kehidupan negara bangsa, termasuk landasan

falsafah dan etika serta pandangan hidup yang mendasari ataupun nilai-nilai spiritual yang menghikmatinya.

2. Organisasi pemerintahan negara, yang meliputi tatanan organisasi aparatur pemerintah negara yang berada di wilayah pemerintahan negara dan sering di sebut birokrasi pemerintahan.
3. Manajemen pemerintahan negara, meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintah umum dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan.
4. Sumber daya aparatur negara, sumber daya manusia sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, pengelolaan dan pembinaannya mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya.
5. sistem dan proses kebijakan negara sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara peran administrasi negara dalam pengelolaan kebijakan pemerintah negara.
6. posisi, kondisi dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara, negara eksis pada suatu wilayah karena adanya kesepakatan masyarakat bangsa yang hidup pada wilayah tersebut.
7. Hukum administrasi negara, hal ini meliputi dimensi hukum bertalian dengan peraturan sistem proses dan penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi, tugas dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah. Secara sistematis, berbagai pokok pengamatan dalam disiplin dan sistem

Administrasi negara tersebut dapat dikelompokkan atas unsur-unsur yang melekat pada suatu sistem, yaitu tata nilai (=a), struktur (b,d,f) dan proses (=c,e).

2.1.3 Ciri-ciri Administrasi Negara

Berikut ini akan diuraikan ciri-ciri yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi administrasi negara terutama jika di bandingkan dengan swasta.

Menurut Thoha (2002:47-8), ciri-ciri perbedaan tersebut adalah

- a. pelayanan yang di berikan oleh administrasi negara bersifat urgen di bandingkan dengan pelayanan yang di berikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua

- masyarakat dan kalau di serahkan atau di datangi oleh organisasi lainnya, maka tidak ada akan jalan.
- b. pelayanan yang di berikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
 - c dalam memberikan pelayanan pada masyarakat administrasi negara relatif berdasarkan undang-undang peraturan. Hal ini memberikan warna legislatif dari administrasi negara tersebut.
 - d. Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak di kendalikan oleh harga pasar . pelayanan oleh organisasi negara di tentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
 - e. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara sangat tergantung pada penilaian rakyat yang di layani.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat di katakan bahwa administrasi negara sangat erat berhubungan dengan kepentingan masyarakat, dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terlepas pada pengaruh politik.

2.2 Pembangunan

2.2.1 Pengertian Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat di bagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwelen , Larrin, Kiely, dan (dalam Tikson,2005 : 221).

Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent-development) dan simtem dunia (word sistem teory).sedangkan Tikson (2005 : 109) membaginya kedalam tiga klasifikasi

Teori pembangunan yaitu, modernisasi, keterbelakangan ketergantungan dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Siagian (1994 :98) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha untuk rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*), sedangkan Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup ;proses seruruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan pendidikan dan teknologi, kelembagan, dan budaya (Alexander 1994). Portea (1976) mendefenisikan pembangunan sebagai tranformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang di rencanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat

2.2.2 Teori pembangunan

Teori pembangunan akan terbagi atas 3 teori, yakni antara lain teori modernisasi, dependensi dan teori dunia. Dan contoh implementasi dari ketiga teori tersebut pada kehidupan dapat di lihat pada privatisasi bulog sebagai implementasi dari teori pembangunan. Tiga teori pembangunan menurut sumitro (dalam Deliarnov,2006:89) tersebut antara lain adalah:

- a. Teori Modernisasi
- b. Teori dependensi
- c. teori sistem dunia

Adapun penjelasannya dari 3 teori tersebut yaitu:

- a. modernisasi

perspektif teori teori modernisasi klasik menyoroti bahwa negara dunia ketiga merupakan negara terbelakang dengan masyarakat tradisionalnya.

Sementara negara-negara Barat di lihat sebagai negara modrn. Aliran modernisasi memiliki ciri-ciri antara lain:”sumber perubahan adalah dari dalam atau dari budaya masyarakat itu sendiri (internal resources) bukan ditentukan unsur luar”. Modernisasi diartikan sebagai proses tranformasi.

Dalam rangka mecapai setatus modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total di ganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern.

Modernisasi merupakan proses sistematik. Modernisasi melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya industrialisme, diferensiasi,sekularisasi, sentralisasi dsb.

Ciri-ciri pokok teori modernisasi:

1. modernisasi merupakan proses terhadap
2. modernisasi juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi
3. modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya, sebagai proses ekuropanisasi dan Amerikanisasi, atau modernisasi sama dengan Barat.
4. modernisasi juga dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur.
5. modernisasi merupakan perubahan progresif.
6. modernisasi memerlukan waktu panjang. Modernisasi dilihat sebagai proses evolusioner, dan bukan perubahan revolusioner.

b. Teori Dependensi

Teori Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia ketiga. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori ini mencermati hubungan dan keterkaitan negara Dunia ketiga dengan negara sentral di Barat sebagai hubungan yang tidak berimbang dan karenanya hanya menghasilkan akibat yang akan merugikan Dunia ketiga. Negara sentral di Barat akan selalu dan menindas negara Dunia ketiga dengan selalu berusaha menjaga aliran surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara sentral. Teori ini berpangkal pada filsafat materialisme yang dikembangkan Karl Marx. Salah satu kelompok teori yang tergolong teori struktural ini adalah teori ketergantungan yang lahir dari 2 induk, yakni seorang ahli pemikiran liberal

Raul Prebisch dan seorang pemikir marxis yang merevisi pandangan marxis tentang cara produksi Asia yaitu, Paul Baran. Yaitu

1. Raul Prebisch : industri substitusi impor. Menurutnya negara-negara terbelakang harus melakukan industrialisasi yang di mulai dari industri substitusi impor
2. Paul Baran: sentuhan yang mematikan dan kretinisme. Baginya perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara pingiran, sistem kapitalisme yang membuat orang tetap kerdil.

c. Teori sistem Dunia

Teori sistem Dunia yang di kemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Hal ini dikarenakan bahwa dalam suatu sistem social perlu dilihat bagian-bagian secara menyeruruh dan keberadaan negara-negara dalam Dunia internasional tidak boleh dikaji secara tersendiri karena ia bukan satu sistem yang tertutup.

Teori ini berkeyakinan bahwa tak ada negara yang dapat melepaskan diri dari ekonomi kapitalis yang mendunia. Wallerstein menyatakan sistem Dunia modern adalah sistem ekonomi kapitalis. Internasional tidak boleh dikaji secara tersendiri karena ia bukan satu sistem yang tertutup. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada negara yang dapat melepaskan diri dari ekonomi kapitalis yang mendunia. Wallerstein menyatakan sistem Dunia modern adalah sistem ekonomi kapitalis. Menurut Wallerstein, sistem Dunia kapitalis dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. negara *corea* atau pusat, e mengambil keuntungan yang paling banyak, Karena kelompok ini dapat memanipulasikan sytem Dunia sampai batas-batas tertentu.
2. Semi-peiferi atau setengah pinggiran e mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitir Negara periferi atau pinggiran.

2.3 Good Governance

2.3.1 Pengertian Good Governance

Good governance sering di terjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau di sebut juga dengan istilah *civil society*. *Good governance* pada dasarnya suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat di pertanggungjawabkan secara bersama.

Good governance menurut mardiasmo (1998:18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada sekttor publik oleh pemerintah yang baik. Menurut Rachman (dalam akaduin,2009:150), secara lebih khusus dalam konteks pembangunan, mendefenisikan *Governance*.

Sebagai mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan. *Good governance* menurut defini ini adalah mekanisme pengelolaan menunjang pembangunan yang statbil (dengan syarat utama efisien) serata merata.

Dari pengertian diatas ditarik kesimpulan bahwa makna lain dari *good Governance* merupakan seni atau gaya moral pemerintah yang baik. Lebih memerlukan butir-butir moral-legal dalam pelaksanaannya. *Good governance*

menunjukkan pada suatu penyelenggaraan Negara yang bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi konstruksi diantara institusi negara atau pemerintahan. Sektor swasta atau dunia usaha atau masyarakat.

Sebagai perwujudan pemerintah yang baik (*Good governance*) dapat dilihat pada aspek fundamental, adapun definisi *good governance* menurut Sedarmayanti (2003:183) yaitu:

1) partisipasi

Setiap orang atau warga Negara mempunyai hak suara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan pendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) kepastian Hukum (Rule Of Law)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (impartial), terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

3) Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4) tanggung jawab (Responsiveness)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

5) Berkeadilan (Equity)

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

6) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan di arahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebai-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

7) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (*Decision-maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga madani memiliki pertanggungjawaban (Akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder).

Tiga pelaku utama good governance adalah pertama pemerintah atau lembaga Institusi setiap kegiatan dalam proses pengembabangan dan pembangunan secara berkala dan menyeluruh. Selanjutnya pemerintah juga memiliki peran memberi peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.

Kedua, swasta berperan sebagai pelaku pertama dalam pembangunan, menjadikan usaha sektor non pertanian sebagai penggerak utama yang sangat di prioritaskan dalam sektor pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja dan kontribusi utama penerimaan pemerintah dan daerah.

Ketiga, masyarakat berperan sebagai pemeran utama, (bukan berpartisipasi) dalam proses pengembangan dan pembangunan, perlu penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsi, srta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efesiensi , produktifitas dan kualitas produknya.

2.3.2 prinsip Good Governance

- a. proposionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan para akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses

2.3.3 karakteristik Good governance

Karakteristik good governance dari United Nation Development program (UUDP), yakni :

1. partisipasi

Konsep partisipasi tentu sejalan dengan system pemerintahan yang demokrasi yang di terapkan di Indonesia. Partisipasi secara sederhana berarti adanya peran seta dalam suatu lingkungan kegiatan. Dalam pelayanan publik, partisipasi tidak hanya terjadi di antara pihak pemerintah melalui birokrat yang kemudian membuat kebijakan mengenai pelayanan yang akan di berikan , tetapi juga harus melibatkan masyarakat sehingga mengetahui lebih lanjut apa yang sebenarnya yang di butuhkan masyarakat

dalam pelayanan publik. Tujuan utama dari adanya partisipasi sendiri adalah untuk mempertemukan kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu perumusan dan pembuatan kebijakan secara berimbang untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh. Keterlibatan masyarakat lebih kepada pengharapan akan tertampungnya berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh birokrat selama ini. Masyarakat terlibat baik dalam bentuk perencanaan untuk mengedepankan keinginan terhadap pelayanan publik, perumusan atau pembuatan kebijakan, serta juga sebagai pengawas kinerja pelayanan.

2. Rule of law

Rule of law berarti penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, yang mengatur hak-hak manusia yang berarti adanya supremasi hukum.

3. Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama pemberi pelayanan publik.

Transparansi menyangkut kebebasan informasi terhadap publik. Satu hal yang membedakan organisasi swasta dan publik adalah dalam masalah transparansi sendiri. Dalam organisasi swasta, keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang menjadi harus. Banyak hal yang dirasa harus dirahasiakan dari publik dan hanya terbuka untuk beberapa pihak.

4. Responsif

Responsif berarti cepat tanggap. Birokrat harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan public (public interest) sehingga cepat berbenah diri. Dalam hal ini, Birokrasi dalam memberikan pelayanan publik harus cepat beradaptasi dalam memberikan suatu model pelayanan. Masyarakat yang sosok kepentingannya tidak bisa di samakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan. Masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih mudah/simple dalam memenuhi berbagai kepentingannya.

5. Berontasi pada consensus

Berontasi pada consensus berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama di antara para actor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan konsep partisipatif dimana adanya keterlibatan dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik.

6. Keadilan

Keadilan berarti semua orang (masyarakat), baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan publik oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak boleh berbuat diskriminatif dimana hanya mau melayani pihak-pihak yang di anggap perlu untuk di layani, sementara ada pihak lain yang terus

dipersulit dalam pelayanan bahkan tidak dilayani sama sekali. Konsep keadilan masih terlihat sulit diterapkan dalam pelayanan publik di Indonesia. Hal ini bisa dipengaruhi karena konflik kepentingan birokrasi.

7. efektif dan efisien

Efektif secara sederhana berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Dalam bentuk pelayanan publik, hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti tanggung gugat yang merupakan kewajiban untuk member pertanggungjawaban dan berani untuk di tanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam pemberian pelayanan publik, Akuntabilitas dapat di nilai sudah efektifkah prosedur yang di terapkan oleh organisasi tersebut, sudah sesuaikah pengaplikasiannya, dan bagaimana dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain. Dalam birokrasi, akuntabilitas yang berarti akuntabilitas publik menjadi sesuatu yang sepertinya menjadi sosok yang menakutkan. Menurut Turner dan Hulme (Mardiasmo, 2002), menerapkan akuntabilitas memang sangatlah sulit, bahkan lebih sulit dalam memberantas korupsi. Akuntabilitas saat ini

menjadi konsep utama yang harus diterapkan dalam organisasi publik dalam mendongkrak kinerja mereka tentunya.

9. Strategic vision

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya keselarasan dan integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan luar belakang sejarah, kondisi social, dan budaya masyarakat. Dalam era yang berubah secara dinamis seperti sekarang ini, setiap domain dalam good governance perlu memiliki visi yang strategis. Tanpa adanya visi semacam itu, maka suatu bangsa dan Negara akan mengalami ketertinggalan visi itu sendiri dapat dibedakan antara visi jangka panjang (*long term vision*) antara 20 sampai 25 tahun (satu generasi) serta visi jangka pendek (*short term vision*) sekitar 5 tahun.

Indonesia adalah satu Negara dunia yang sedang berjuang dan mendambakan *clean and good governance*. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya di tegakan dalam berbagai institusi penting pemerintahan, prinsip-prinsip meliputi: partisipasi masyarakat tegaknya supermasi hukum, transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi, kesetaraan efektifitas dan efisien, akuntabilitas dan visi strategi.

2.4 Partisipasi Masyarakat

2.4.1 Pengertian Partisipasi

Definisi partisipasi menurut Canter (Dalam Mulyadi, 2009:17) adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umum, dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang berwenang.

Menurut Goulet (dalam Sirajuddin, 2006:15) menyebutkan bahwa partisipasi sebagai pendayagunaan peran serta masyarakat dalam usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.

Menurut Janabrota (dalam Ndraha, 1990:20) mengartikan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri.

Menurut Lukman Soetrisno (1995:207) definisi yang berlaku universal adalah partisipasi sebagai kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Arenstein (1969) menggambarkan tingkatan dalam partisipasi masyarakat.

Partisipasi menurutnya dibagi-bagi ke dalam tiga level utama, yaitu: nonparticipation (manipulation dan therapy), degree of tokenism (informing, consultation, placation), dan degree of citizen power (partnership, delegated power, dan citizen control).

Secara lebih spesifik partnership mengasumsikan bahwa kekuasaan

Didistribusikan antara masyarakat dan pemegang kekuasaan lainnya. Sedangkan menurut Henifah Sj Sumarto, partnership dilaksanakan untuk mencapai tujuan governance dan memiliki tiga prinsip dasar. Ketiga prinsip dasar dalam partnership tersebut adalah prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian (Sumarto,2009:16). Sejalan dengan perkembangan politik dan pemerintahan, partisipasi kemudian lebih condong pada pengertiannya sebagai bagian dari demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, orang berpartisipasi melalui cara yang berbeda. Misalnya dengan cara voting, mengungkapkan pendapat tentang isu-isu publik dan tindakan pemerintah, membentuk kelompok-kelompok kepentingan, mempengaruhi keputusan dengan melobi, mengajukan tuntutan hukum untuk melawan, atau membangun kemitraan dengan instansi pemerintah (NRC,2008).

Partisipasi dapat dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan (Slamet, 1993: 3). Partisipasi masyarakat Madani dapat menjadi kekuatan penyeimbang (balancing forces) bagi pemerintah. Dalam penelitian ini, partisipasi dimaknai sebagai kerja sama antara masyarakat dan swasta yang terbentuk memungkinkan pemerintahan berjalan bersama menuju tata pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut Priscoffi (dalam Suporahordjo,2005), nilai inti dari partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus punya suara dalam keputusan tentang tindakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2. Partisipasi masyarakat meliputi jaminan bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi keputusan.
3. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan dan memenuhi kebutuhan semua proses partisipasi.
4. Proses partisipasi masyarakat berupaya dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang berpotensi untuk berpengaruh.
5. Proses partisipasi melibatkan partisipasi dalam mendefinisikan bagaimana berpartisipasi.
6. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada partisipan bagaimana input mereka digunakan atau tidak digunakan.

Proses partisipasi masyarakat memberi partisipasi informasi yang mereka butuhkan dengan cara yang bermakna.

Menurut saya bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggungjawab atas keterlibatannya.

Bentuk partisipasi yang nyata yaitu:

- a) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- b) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- c) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- d) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya dalam anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

- e) Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Cohen dan Uphoff (dalam Mulyadi,2009), memberikan rumusan “partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai *participation in decision making; participation in implementation; participation in benefit; participation in evaluation*”.

Bentuk-bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut diatas merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat. Untuk lebih memahami rumusan partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff tersebut akan di jadikan dimensi dalam pembahasan penelitian ini, dapat di jelaskan sebagai berikut

1. *Participation in decision making*

Participation in decision making atau partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat di libatkan dalam perumusan/proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat/saran dalam menilai suatu program/kebijakan yang di tetapkan. Pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menukai kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.

2. *Participation in iimplementation*

Psrticipstion in implementation atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atas pembangunan desa. Partisipasi dalam pelaksanaan ini dapat berwujud kontribusi. Uphoff (dalam Kaho,1995:115) mengemukakan bahwa : partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan desa yang berujud tenaga, uang, dan barang material.

3. *Participation in benefit*

Participation in benefit atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih/positif bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan partisipasi tersebut masyarakat harus menerima manfaat positif yang di timbulkan dari kegiatan pembangunan desa tersebut. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa di caoi.

4. *Participation in evaluation*

Participation in evaluation atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasib dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dalam memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintah agar sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dan mencapai hasil yang telah di tetapkan. Evaluasi mengandung arti membandingkan atau mengukur sejauh mana pembangunan yang sedang

dan telah dilaksanakan tersebut berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya menurut Adisasmita (2006 :75) mengatakan bahwa partisipasi

Anggota masyarakat, yaitu sebagai berikut:

partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan. Keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dalam pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang di kerakan dalam masyarakat lokal yang merupakan salah satu bentuk perberdayaan masyarakat secara aktif yang beriontesesi pada pencapai hasil.

Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari msyarakat

Dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program , dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta di libatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahtraan mereka.

Menurut Janabrota (dalam Ndraha, 1990:20) mengartikan bahwa” partisipasi masyarakat sebagai kesediaan untuk membantu hasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri”,

Adapun menurut Ndraha (dalam yumi, 2002) partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat di pilahkan sebagi bertikut :

1. Partisipsi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan / menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi melaksanakan), menerima syarat ataupun dalam arti menolaknya.

3. Partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.4.2 Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor luar masyarakat (eksternal), yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Stratifikasi masyarakat tersebut akan menyebabkan terbentuknya kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang akan mempengaruhi perilaku tolong-menolong yang menjadi jiwa partisipasi.

Menurut Selamat (dalam Sunarti,2003:79) faktor-faktor yang memperhamhat partisipasi masyarakat dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. faktor internal, yaitu yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup sumberdaya manusia, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan pengalaman berkelompok. Adapun

penjelasan dan faktor-faktor internal yang menjadi faktor penghambat dari partisipasi masyarakat yaitu :

a. Sumberdaya manusia

Salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat di lepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Dalam partisipasi SDM sangat penting adanya, karena pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya SDM.

b. Tingkat pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

c. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak bisa di pisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi sehari-harinya dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat pekerjaannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus di dukung oleh perekonomian yang mapan.

2. faktor eksterna, yaitu hubungan yang terjalin antara pihak pengelola dengan sasaran yang tepat mempengaruhi partisipasi sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak pengelola positif dan

menguntungkan mereka. Selain itu, bila untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program yang berasal dari luar antara lain mencakup : komunikasi, iklim sosial dan budaya, lingkungan, dan keterbatasan lahan. Dan adapun penjelasan dari faktor eksternal yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat, yaitu :

a. komunikasi

komunikasi yang intensif antar individu atau kelompok akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dan melaksanakan suatu program. Komunikasi dalam suatu program dapat berhasil jika dalam suatu proses komunikasi yang di bina bisa saling bekerjasama, namun dalam proses komunikasi antar pegawai dan masyarakat jarang terjadi dengan sendirinya, sebab mungkin diantara pegawai dan masyarakat terdapat perbedaan persepsi. Untuk memperoleh hasil komunikasi yang efektif harus diimbangi dengan pengetahuan pegawai dan masyarakat setempat yang dibina.

b. lingkungan kerja

lingkungan merupakan bagian terpenting dan mendasar dari kehidupan masyarakat. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Jika dalam suatu lingkungan banyak masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial tentunya akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut dan sebaliknya.

Dengan kata lain lingkungan akan merubah perilaku seseorang yang ada dilingkungannya.

2.4.3 Upaya mengatasi Hambatan partisipasi masyarakat

Dalam proses partisipasi masyarakat mungkin saja terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam partisipasi masyarakat itu sendiri, maka dalam pembahasan ini akan menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat menurut Selamet (dalam Sunarti,2003:79), yaitu :

1. faktor internal, yaitu yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

Karakteristik individu mencakup sumberdaya manusia, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan/pendapatan, dan pengalaman berkelompok. Adapun penjelasan dari faktor-faktor internal yang menjadi upaya dalam mengatasi hambatan dari partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Sumber daya manusia

individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus di latih dan di kembangkan kemampuannya. Dalam hal mengatasi faktor penghambat SDM merupakan hal yang penting yang mempengaruhi partisipasi manusia. SDM sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan.

- b. Tingkat pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Partisipasi akan terlaksana dengan baik maka tingkat pendidikan atau pengetahuan

tentang pembangunan desa harus mengerti, baik itu secara pengelolaan ataupun pengawasan pembangunannya masyarakat harus memahaminya agar hasil yang di dapat juga maksimal.

c. Pekerjaan dan penghasilan

Hal yang tidak dapat di pisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan di perolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan menyukupi dalam sehari-harinya dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat pekerjaanya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

2. faktor eksternal, yaitu hubungan yang terjalin antar pihak pengelola dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi. Sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu, bila untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program yang berasal dari luar antara lain mencakup : komunikasi, iklim dan sosial budaya, lingkungan, dan keterbatasan lahan. Dan adapun penjelasan dari faktor eksternal yang menjadi upaya dalam mengatasi hambatan dari partisipasi masyarakat, yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi dalam suatu program dapat berhasil jika dalam suatu proses komunikasi yang dibina bisa saling bekerjasama. Komunikasi di perlukan

dalam sebuah institusi ataupun organisasi begitupun dalam pembangunan desa. Dalam partisipasi masyarakat sangat membutuhkan partisipasi yang sangat baik antar pegawai dan masyarakat. Untuk memperoleh hasil komunikasi yang efektif harus diimbangi dengan pengetahuan pegawai dan masyarakat setempat yang dibina.

b. Lingkungan kerja

merupakan bagian terpenting dan mendasar dari Lingkungan kehidupan masyarakat. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Jika dalam suatu hubungan lingkungan banyak masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial tentunya akan mempengaruhi masyarakat tidak aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial tentunya akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut dan sebaliknya. Dengan kata lain lingkungan akan mengubah perilaku seseorang yang ada di lingkungannya

2.4.4 Tingkatan dalam partisipasi

Partisipasi menurut Arnstein (2005) dalam tingkatannya dapat di bedakan menjadi 8 tingkatan, yaitu :

- a. *Manipulation*, merupakan tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.
- b. *Consultation*, yaitu dimana stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
- c. *Consensus-building*, yaitu dimana pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan

seluruh anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat fasip.

- d. *Decision-making*, yaitu dimana konsensus terjadi disarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
- e. *Risk-taking*, yaitu dimana proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan resiko yang diharapkan dari hasil keputusan.
- f. *Partnership*, yaitu memerlukan kerja ssecara equal menuju hasil yang mutual. Ekual tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam bertanggung jawab.
- g. *Self-management*, yaitu puncak dari partisipasi masyarakat, stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar (*learning proces*) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.
- h. *Therafi*, yaitu memegang kekuasaan memberikan alasan proprosal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat.

2.4.5 Bentuk-Bentuk partisipasi masyarakat

Bentuk-Bentuk partisipasi masyarakat menurut Davis (dalam Sastropetro, 1985:18) :

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
2. Sumbangan, spontan berupa uang dan barang.
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari. sumbangan dari individu / instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga)..
4. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komunikasi (biasanya di putuskan oleh rapar komunitas).
5. sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
6. Aksi masa.
7. Membangun proyek komunitas yang bersifat otonom.

2.4.6 Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

Jenis-jenis partisipasi masyarakat menurut Davis (dalam Sastropetro, 1985:18 yaitu :

1. pikiran (psychological participation).
2. Tenaga (physical participation).
3. Pikiran dan tenaga (participation dan physical participation).
4. Keahlian (participation with skill).
5. Barang (material participation).
6. Uang (money participation).

2.5 Kaitan antara Adminisi Negara, Teori pembangunan, Good govenance dengan Partisipasi Masyuarakat

Permasalahan yang dikaji dalam penelittian ini yaitu berkenaan dengan partisipi masyarakat, sesungguhnya merupakan wilayah kajian dari Adminisrasi Negara, Teori pembangunan dan Good Governance. Peningkatan dan perubahan partisipasi masyarakat dalam suatu negara sangat berpengaruh dalam system dan proses administrsi negara, dalam organisasi dalam manajemen pemerintahan negara, dalam pembangunan, dalam Good Governance, dan proses penyelenggaraan kebijakan negara. Dalam hal ini, peran hubungan antara aparatur negara dengan warga negara di samping di pengaruhi oleh sistem sosial politik dan pemerintahan yang dianut, juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

Senada dengan pendapat Wildoyang (dalam Iskandar,2005:18) bahwa : Administrasi negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunaan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Administrasi negara meliputi seluruh kegiatan mulai saat menentukan tujuan yang akan dicapai sampai kepada penyelenggaraan mencapai tujuan negara. Administrasi sebagai suatu wadah sekelompok orang untuk bekerja sama secara formal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari uraian di atas dapat kita simpulnya bahwa dalam sebuah organisasi tidak terlepas dari berbagai unsur, misalnya partisipasi masyarakat. Administrasi merupakan ilmu kerjasama antara berbagai pihak, dalam kerjasama tersebut tidak terlepas atau berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Sosialisasi dapat menimbulkan peningkatan masyarakat, dengan begitu program yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Adapun dalam teori pembangunan partisipasi masyarakat juga sangat berhubungan. Seperti di jelaskan menurut kuncoro (2004:3), pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam pembangunan.

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses

pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat *Community Development* sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerja sama erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan masyarakat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

Termasuk *Good governance* disini bahwa sangat berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Menurut Meutia Ganie Rachman *good governance* adalah sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.

Dalam *Good Governance* dijelaskan bahwa harus adanya partisipasi, dimana dalam karakteristik *Good Governance* adanya partisipasi, yaitu mengajak semua

penduduk menggunakan haknya untuk mengepresikan opini mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara, Teori pembangunan, Good Governance dengan partisipasi sangat berkaitan erat, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan optimal, jadi semuanya sangat bersinambungan satu sama lainnya.

2.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang posisi dan kelayakan penelitian tentang analisis perilaku mahasiswa. Selain itu, dimaksudkan pula untuk memberikan gambaran tentang perbedaan fokus masalah dan hasil penelitian. Untuk itu peneliti akan menjelaskan secara singkat kesimpulan hasil dari judul penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penilaian perilaku terhadap dosen/ mahasiswa yang akan dijadikan isi dari kajian penelitian terdahulu bagi peneliti.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang perilaku, antara lain yang dilakukan oleh peneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Cimalaka. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian sebagai berikut:

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	<p>Hamka Namping, Universitas Hasanudin (2009). Pembangunan insfaktuktur pengaruh partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan insfaktuktur desa (studi kasus: Dana Desa di Desa Biolo Kabupaten Bulukumba)</p>	<p>Variabel partisipasi masyarakat</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat berada pada tingkat kurang baik dengan prosentase 47,89%.seda ngkan tingkat pembanguna n insfaktuktur berada pada tingkat kurang baik dengan prosentase 50,12%.korel ase antara parstisipasi masyarakat dengan pembanguna n insfastruktur, dengan rumus product momen, dari perhitungan data diperoleh nilai korelasi</p>

				(rxy) sebesar 0,8, dan dari analisis koefisien determinasi diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat mempengaruhi pembangunan infrastruktur sebesar 67,24%.
		Variabel	Kuantitatif	-adanya saling
2	Lira Azhimatinnur Riansah, Universitas Siliwangi (2008) “pengaruh partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran dengan asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel Moderating”	partisipasi		Berpartisipasi antar masyarakat dalam masalah anggaran. - adanya kecukupan dalam anggaran. -adanya kesenjangan yang terjadi.
3	Anisa amelia Universitas Sebelas April Sumedang (2006) “pengaruh sosialisasi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan	Partisipasi masyarakat	Kuatitatif	Hasil penelitian terhadap sosialisasi dina kehutanan dan perkebunan Kabupaten

	<p>produktifitas hasil hutan dan kebun di dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten Sumedang”</p>		<p>Sumedang berjalan dengan sangat baik ternyata dilihat dari jawaban responden rata-rata sebesar 88,3%. Partisipasi masyarakat dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten sumedang berjalan dengan sangat baik dengan rata-rata sebesar 89,2%. Korelase antara sosialisasi dengan partisipasi masyarakat dinas kehutanan dan oerkebunan kabupaten sumedang rendah dan signifikan sebesar 0,35%. Dan pengaruhnya</p>
--	--	--	--

				mencapai 12,25%.
--	--	--	--	------------------

Atas hasil penelitian diatas, maka peneliti ingin membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. Persamaan

persamaan penelitian pertama ini dengan peneliti adalah bebasnya sama-sama menggunakan teori partisipasi masyarakat dan untuk pembangunan insfaktuktur pengaruh partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, penelitian kedua memiki objek yang sama yaitu pengaruh partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran dengan asimetri informasi dan kecukupan anggaran sebagai variabel Moderating” . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat dengan proses pembangunan insfaktuktur. Penelitian ketiga, sama halnya dengan penelitian kedua sama-sama memiliki objek peneltian mengenai peningkatan partisipasi masyarakat, menggunakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yang sama.

2. Perbedaan

Selain memiliki persamaan, penelitian ini sudah tentu memiliki perbedaan. Perbedaan pada penelitian pertama yaitu, perbedaan lokus penelitian, perbrdaan objek penelitian, perbrdaan informan dan hasil penelitian yang

berbeda. Penelitian kedua, memiliki perbedaan informan penelitian dan juga hasil penelitian. Yang terakhir penelitian ketiga, memiliki perbedaan lokus penelitian. Informan penelitian, dan juga hasil penelitian yang berbeda.

2.7 Kerangka penelitian dan kisi-kisi pertanyaan penelitian

2.7.1 Kerangka penelitian

Landasan berfikir dalam melakukan kegiatan ini, peneliti mengambil teori-teori yang berhubungan dengan teori partisipasi masyarakat, dengan maksud memberikan suatu kejelasan arah dan tujuan dari peneliti ini. Dalam pembangunan desa di Kecamatan Cimalaka, pasti tidak akan terlepas dari partisipasi masyarakat karena pembangunan desa dibutuhkan tenaga dari masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai tahap evaluasi.

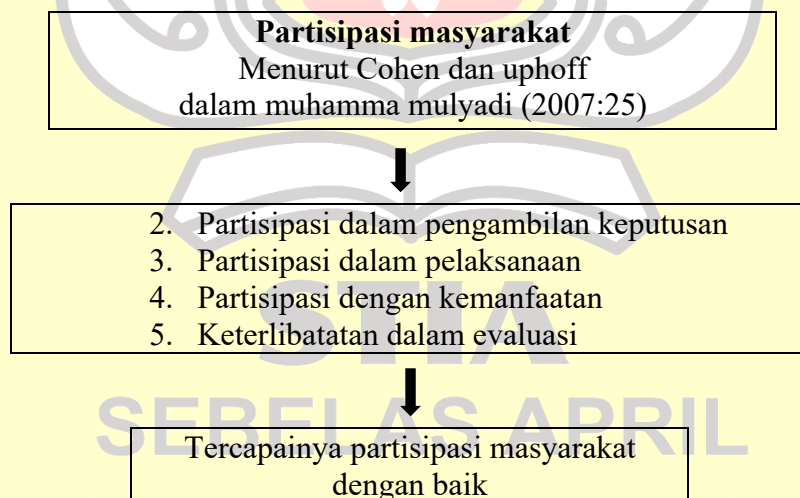
Partisipasi anggota masyarakat adalah ketelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerangkan dalam masyarakat lokal yang merupakan salah satu bentuk perbedayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan suatu program, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab

sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan program. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentu arah, strategi kebijaksanaan program yang dilaksanakan.

Dalam proses partisipasi masyarakat pihak-pihak yang terlibat dalam keberhasilan suatu partisipasi masyarakat yaitu pegawai Kecamatan Cimalaka yang membuat suatu program tersebut dan masyarakat di sekitar yang membantu merealisasikan suatu program tersebut.

Dari uraian diatas maka kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.7.2 Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat di sekitar desa dalam program pembangunan desa di kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat di sekitar desa dalam program pembangunan desa di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?
3. Apasaja upaya-upaya dalam mengatasi partisipasi masyarakat di sekitar desa dalam program pembangunan desa di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?

Upaya untuk mengarahkan dan mempermudah pembahasan lebih lanjut. Penelitian mengemukakan deine oprasonal variabel penelitian sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat adalah bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat dengan para pegawai Kecamatan Cimalaka dalam pembangunan desa dan dilakukan secara bersama sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat pembangunan desa dapat di wujudkan secara optimal dan profesional.
2. Teori yang dijadikan alat ukur partisipasi masyarakat adalah dimensi-dimensi partisipasi masyarakat menurut Cohen dan uphoff Dalam muhammad mulyadi (2007:25), yang terdiri dari partisipasi dalam

pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dengan kemanfaatan dan keterlibatan dalam evaluasi.

Untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui operasionalisasi variabel penelitian sebagaimana tabel 2.2 di bawah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Fokus Permasalahan	Dimensi	Indikator	Item
Partisipasi Masyarakat Menurut Cohen dan Uphoff Dalam Muhammad Mulyada (2009:25-49)	Partisipasi dalam pengambilan keputusan	Keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan	1
		Mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan	2
		Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan data dan informasi dalam setiap pertemuan	3
		Keikutsertaan masyarakat dalam proses/perumusan pembuatan keputusan	4
	Partisipasi dalam pelaksanaan	Keikutsertaan dalam pelaksanaan program pembangunan desa	5
		Adanya kontribusi dengan tenaga	6
		Sumbangan dan dukungan masyarakat	7
	Partisipasi dengan	Tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan desa	8
		Kepedulian masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan	9

	kemanfaatan	Mengikuti kegiatan dalam program pembangunan desa	10
	Keterlibatan dalam evaluasi	Keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan	11
		Keterlibatan masyarakat dalam menilai hasil pembangunan program pembangunan desa	12
		Keaktifan masyarakat dalam memberikan saran dan kritik	13
Faktor penghambat partisipasi masyarakat Menurut Selamet (dalam Sunarti, 2003:79)	Internal		
	Sumber daya manusia	Kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan	14
	Tingkat pendidikan	Kurangnya masyarakat memahami	15
		Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah	16
	Pekerjaan dan penghasilan	Harapan pegawai dan masyarakat kurang terpenuhi	17
	Eksternal		
	Komunikasi	Pemahaman program	18
		Hubungan antar pegawai dan pegawai kecamatan cimilaka	19
		Lingkungan kerja	Keterbatasan pengawasan dari pegawai kecamatan cimilaka
	Kurangnya pengawasan dari masyarakat		21
Internal			
Upaya-upaya dalam mengatasi partisipasi masyarakat menurut	Sumber daya manusia	Adanya penambahan sumber daya manusia yang kurang	22
	Tingkat pendidikan	Adanya sosialisasi tentang pembangunan desa kepada masyarakat	23
	Pekerjaan dan penghasilan	Adanya penghasilan tetap kepada masyarakat	24

Selamet (dalam Sunarti,2003:79)	Eksternal		
	komunikasi	Adanya kerjasama yang baik antar pegawai dan masyarakat	25
		Adanya sosialisasi tentang program	26
	Lingkungan kerja	Melaksanakan program dengan disertai pengawasan	27



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah metode kualitatif atau yang sering disebut dengan metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)

Metode kualitatif ini digunakan karena dianggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan yang dihadapi dilapangan, hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2007:17), yaitu bahwa:

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda; kedua, ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penanaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Menurut Sugiono (2014:9) memberikan pengertian sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Karakteristik tertentu. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai alat (instrumen)
3. Metode kualitatif
4. Analisis data secara induktif
5. Teori dan dasar
6. Deskriptif
7. Lebih mementingkan proses dari pada hasil

8. Adanya “batas” yang ditentukan oleh “fokus”
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
10. Desain yang bersifat sementara
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama
12. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
13. Desain yang bersifat sementara
14. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama

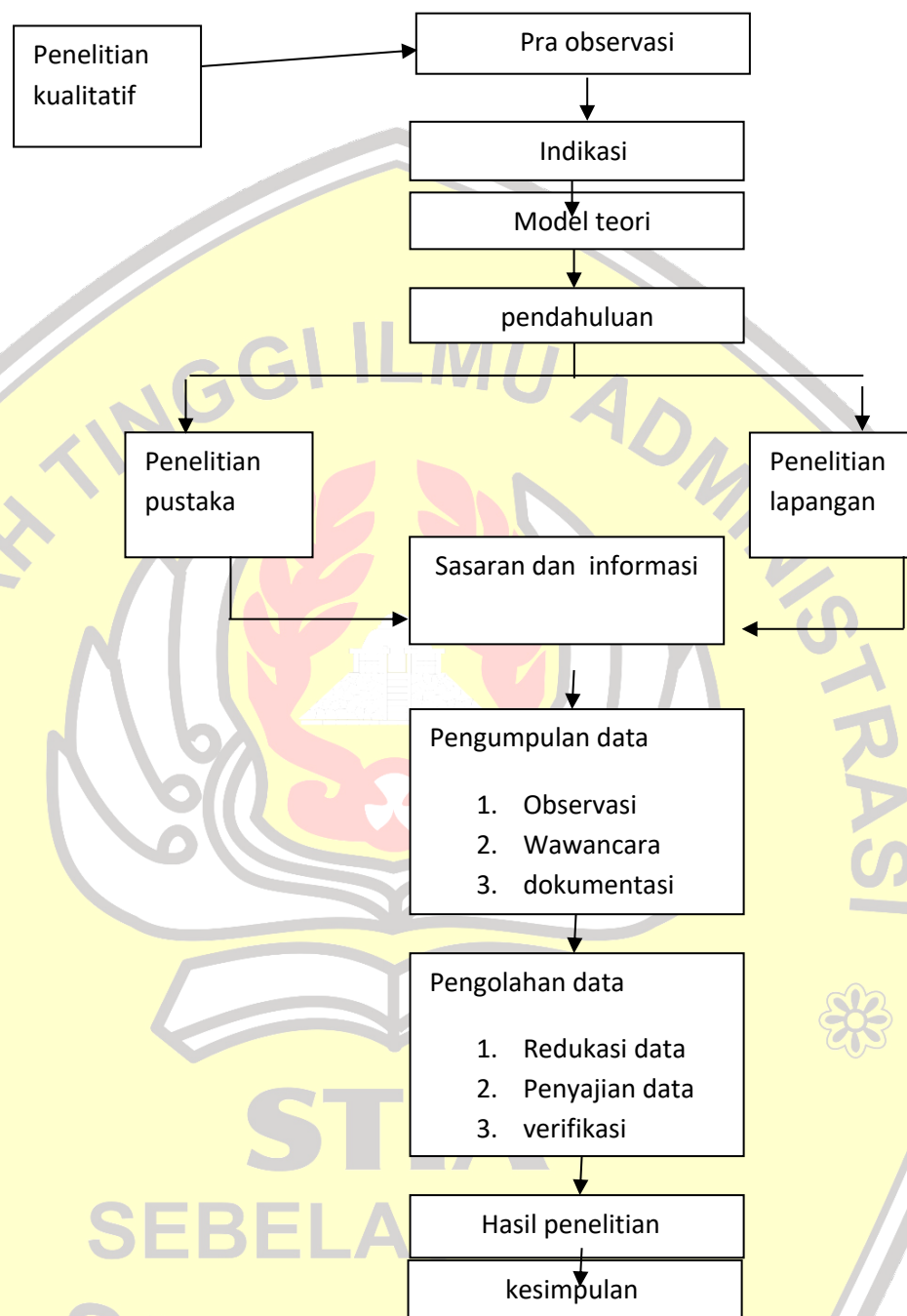
Dalam penelitian ini yang diamati adalah pegawai dan masyarakat yaitu partisipasi masyarakat di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

sehingga Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang di dapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. penggunaan metode kualitatif memang dalam penyelesaian permasalahan lebih cepat dicarikan jawaban. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiono (2014:9), yaitu bahwa :

Dengan digunakannya metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel lebih bermakna tujuan penelitian dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif ini, bukan karena metode ini baru dan lebih ‘trendi’, tetapi memang permasalahannya lebih tetap dicarikan jawabannya dengan metode kualitatif.

Dengan demikian penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat diperoleh data yang lebih tuntas dan pasti sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi serta tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Berdasarkan uraian teori dan uraian diatas, maka desain penelitian dapat digambarkan pada gambar 3.1



Gambar 3.1
Gambar Desain penelitian

3.2 Penentu sasaran, informan, dan Narasumber penelitian

3.2.1 penentu sasaran

Dalam kegiatan penelitian, pada saat pengumpulan data selalu dihadapkan oleh objek yang akan diteliti baik sifat keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sifat pro-kontra, simpati-antipati, baik berupa proses.

Dalam penelitian kuantitatif menggunakan istilah populasi menurut pendapat sugiono (2017:215) “populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya”,

Yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian dengan jumlah 32 orang yang berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Data Pegawai Kecamatan Cimalaka

No	Jabatan	Jumlah	Golongan	Pendidikan
1	2	3	4	5
1.	Camat	1	IV.b	S2
2.	Sekretaris Kecamatan	1	IV.a	S2
3.	Kasi Sosial	1	III.d	S1
4.	Kasi Trantibum	1	III.d	S1

5.	Kasi Pelayanan Umum	1	III.d	S1
6.	Kasi PPM	1	III.d	S1
7.	Kasi Tata Pemerintahan	1	III.d	D3
8.	Kasubag Program & Keuangan	1	III.c	S1
9.	Kasubag Umum, Aset dan Kepegawaian	1	III.b	S2
9.	Pelaksana Gol III	4	III.b & III.a	S1 & SLTA
10.	Pelaksana Gol. II	6	II.c & II.a	SLTA
11.	Tenaga Honorer	13	-	S1 & SLTA
JUMLAH		32		

Sumber : kecamatan cimilaka tahun, 2021

Dari penjelasan diatas bahwa peneliti dalam menentukan sasaran yang diharapkan dimana peneliti dapat dipenuhi situasi tertentu dalam melakukan observasi dan wawancara terharap orang-orang yang dianggap mengerti tentang situasi dan kondisi diwilayah penelitian.

3.2.2 Informan penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang diteliti, baik berupa manusia, benda maupun aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah mendapatkan seluruh karakteristik objek, penelitian itu disebut objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, namun menurut Spradey yang dikutip oleh Sugiyono (2005 :48) dinamakan "social situation" atau situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen, yaitu : tempat (*pleace*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Sedangkan bungin (2008: 76) mengemukakan bahwa : "informasi penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang mehami objek penelitian",

Tektik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposiv sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005: 54). Artinya yang dijadikan sumber data penelitian ini adalah mereka-mereka yang ada hubungannya dengan penelitian partisipasi manusia. Setelah memprhatikan kedua pendapat tersebut, maka dijadikan sasaran atau informan peenelitian itu adalah :

Tabel 3.2
Informan penelitian

No	Jabatan	Jumlah informan
1	Camat Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	1
2	Kasi Sosial	1
3	Kasi pelayan Umum	1
4	Kasi Tata Pemerintahan	1
Jumlah		4

Sumber : Kecamatan Cimalaka tahun, 2021

3.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Karena itu data yang diperoleh dilakukan melalui :

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis berbagai literatur, baik itu buku-buku, dokumen dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan, yaitu studi teknik atau cara dengan mengadakan pengamatan langsung atau objek penelitian, diantaranya melalui teknik berikut ini :

- a. Observasi langsung, yaitu penelitian mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala atau peristiwa dari aspek yang diteliti di lingkungan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara meminta penjelasan atau pendapat kepada Camat Kecamatan Cimalaka atau seksi pelayanan umum dan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau sekretariat.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berupa berbagai macam kegiatan penelitian seperti, dokumentasi pada proses wawancara, dan beberapa proses kegiatan mahasiswa di lingkungan Kecamatan Cimalaka.

3.4 Prosedur pengolahan data

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh yang mengacu pada operasi dasar yang menghasilkan keluaran penting yang mengutip dari model Miles and Huberman (2014 : 12) yaitu sebagai berikut.

1. Data *reduction* (Reduksi data);

Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

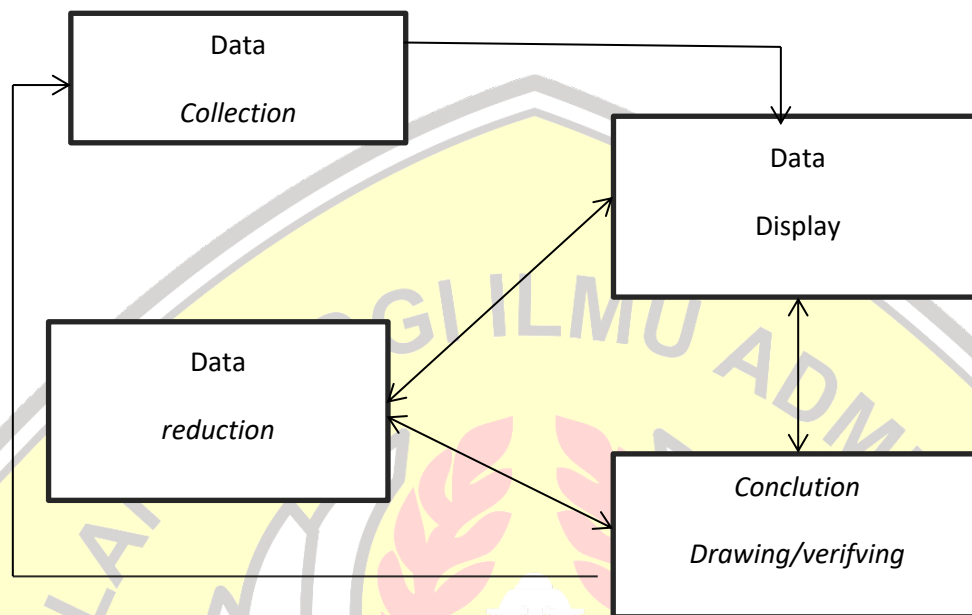
2. *Data Display* (penyajian Data)

Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchat* dan sejenisnya, Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi);

kesimpulan dalam penelitian yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchat* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Adanya temuan berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Berdasarkan uraian diatas, maka analisis data tersebut diatas oleh Sugiyono (2016:247) digambarkan sebagai berikut :



Gambar
3.2: Bagan pengolahan data
 Sumber: Hasil penelitian 2021

4) Triangulsi

Triangulasi, yaitu pengumpulan data yang merupakan penggabungan dari tektik-teknik pengumpulan data tersebut diatas.

3.5 Lokasi dan jadwal penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah paertisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Pelaksanaan penelitian dengan jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agust 2021
1	Tahap Persiapan										
	a. Studi Kepustakaan	■									
	b. Observasi Awal										
	c. Pengajuan Judul										
	d. Pembuatan Proposal		■					■			
	e. Seminar Proposal										
f. Perbaikan hasil seminar proposal											
2	Tahap Pelaksanaan dan Penyusunan							■			
	a. Pengumpulan Data							■			
	b. Pengolahan Data										
3	c. Penyusunan Skripsi									■	
	Tahap Pengujian										
	a. Sidang Skripsi										■
	b. Perbaikan Sidang Skripsi										
c. Publikasi											

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

BAB V

KESIMPULSN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah di uraikan pada bab IV (empat) mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, dalam penelitian ada beberapa hal yang masih belum bisa dikatakan baik, yaitu dalam menghadiri rapat perencanaan masyarakat disana kurang aktif, dan dalam memberikan saran ataupun masukan mereka kurang aktif sekali meraka lebih menunggu apa yang akan dilakukan terkhir dan apa yang menjadi saran yang diterima dalam musyawarah tersebut.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, faktor yang paling menghambat diantaranya kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan manusia tentang pembangunan ,tingkat pendidikan yang kurang, dan kurangnya pengawasan dalam mengawasi pembangunan desa.
3. Upaya-upaya dalam mengatasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan cara para pegawai Kecamatan Cimalaka harus terus

memberikan pengetahuan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara pembangunan desa dengan baik dan benar, masyarakat harus lebih meningkatkan lagi kerjasamanya antar pegawai Kecamatan Cimalaka, dan begitupun dalam pengawsannya harus lebih ditingkatkan lagi supaya tidak terjadi masalah dalam pembangunan desa tersebut.

5.2. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Camat Kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang

Kepada Camat Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pembangunan desa kepada masyarakat dengan cara terus menerus memberikan sosialisasi tentang pembangunan desa. Usaha meningkatkan pengetahuan dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan apa itu pembangunan desa, dan bagaimana cara membangun dengan baik, dan juga meningkatkan komunikasi dengan baik antar pemimpin dengan masyarakat, selalu diadakan sosialisasi yang berhubungan dengan program pembangunan desa.

2. kepada masyarakat Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang

Kepada masyarakat Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang diharapkan dapat meningkatkan berpartisipasi dalam pembangunan desa, meningkatkan dalam memberikan pendapat atau saran dalam rapat, meningkatkan keikutsertann masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan, meningkatkan bekerjasama

dengan pegawai Kecamatan Cimalaka supaya dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat harus lebih meningkatkan dalam pengawasan terhadap pembangunan supaya tidak terjadi masalah, seperti mengurangi bahan-bahan bangunan, dan mengambil alat-alat pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoelloh, Oekan 2016. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia
Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Akadun 2009. Administrasi perusahaan Negara Bandung :Alfabeta.
- Akadun 2009. Teknologi informasi Administrasi. Bandung :Alfabeta
- Budiati,Lilin. 2012. Good Governance dalam pengelolaan Lingkungan hidup. Bogor
: Ghalia Indonesia
- Arsayd, Lincoln 1999. Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah.
Yogyakarta : BPFE.
- Mulyadi, Mohammad.2009. partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat
desa. Jakarta : Nadi pustaka
- Sastropoeto, Santoso.1988 partisipasi, Komunikasi, persuasi dan disiplin dalam
pembangunan Nasional . Bandung penerbit Alumni.
- Sunarti 2003. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan secara
kelompok . Semarang . planologi UNDIP
- Ulbert, Silalahi 2009, Studi tentang Administrasi , konsep, Teori dan dimensi.
Bandung sinar Baru Algesindo
- Patta Rapanna, Sukarno.2017 Ekonomi pembangunan. Makasar : CV SAH MEDIA
- Kuncoro, Mudrajat. 2018. Perencanaan pembangunan Daerah. Jakarta PT Gramedia
Pustaka Utama
- Juharni.2015. pengantar ilmu Administrasi Negara. Makasar : CV SAH MEDIA
- Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia. 2003.Moleong Lexi J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya.1989.
- Ndraha Talizihudu. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: PT. Bina
Aksara.1981
- Ningrum, D. W. N., Berliana, D. S. ., Fauzi, I. ., Nurcahyati, S. ., & Wijaya, T. .
(2020). UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI PRIA DALAM PROGRAM
METODE OPERASI PRIA (MOP) DI KABUPATEN SUMEDANG. Journal

Of Regional Public Administration (JRPA), 5(2), 83-91. Retrieved from <http://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/55>

Dokumen

1. Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. UU 23 Tahun 2014 Menjadi Dasar Hukum RPP Partisipasi Masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 tentang prinsip-prinsip pemerintahan.
4. Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
5. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan
6. Perda no.1 tentang pembangunan desa

